

BULETIN

BIOENERGI

Edisi 4 - Juli 2017

www.qprobi.or.id

**INDONESIA
DUKUNG PROGRAM
BIODIESEL TIONGKOK**

Penanggung Jawab
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi
Pengurus APROBI

Alamat Redaksi
Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

**Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)**



*Redaksi menerima kiriman artikel
opini, naskah berita, foto, dan
karikatur. Naskah bisa dikirimkan
melalui pos ke Alamat Redaksi atau
melalui email: office@aprobi.or.id.
Redaksi berhak mengedit dan
mengubah tulisan tanpa mengubah
makna dari tulisan tersebut.*

Biofuelpedia

Biomassa adalah industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tetapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi. (Sumber: wikipedia)

INDUSTRI BIODIESEL LEBIH POSITIF

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menerbitkan buletin Bioenergi pada bulan keempat pada tahun 2017. Buletin yang mulai dipublikasikan pada pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Dalam Rubrik Laporan Utama, kami mengulas dua produsen biodiesel yaitu PT Batara Elok Semesta Terpadu dan PT Ciliandra Perkasa. Bagi Ciliandra Perkasa, pengembangan biodiesel sangat penting mengingat persediaan bahan bakar minyak fosil yang terus menurun dan menyusut setiap tahunnya. Sehingga, perlu mencari substitusinya dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan. Kapasitas produksi pabrik biodiesel Ciliandra sebesar 250.000 MT/tahun atau 287.356 KL/tahun. Sementara itu, PT Batara Elok Semesta Terpadu mulai memproduksi biodiesel semenjak tahun 2016. Fasilitas Produksi biodiesel perusahaan berada di Kawasan Industri Maspion, Gresik Jawa Timur. Jumlah kapasitas produksi biodiesel mencapai 250 ribu metrik ton per tahun. Dalam dua sampai tiga tahun mendatang, perusahaan akan fokus menjalankan kegiatan riset dan pengembangan supaya mencapai kualitas

biodiesel di atas rata-rata produksi kompetitor.

Rubrik Teropong mengulas peluang pasar biodiesel di Tiongkok. Rencana negeri Tirai Bambu yang mengoptimalkan kebijakan biodiesel campuran 5% atau B5 menjadi peluang besar bagi produsen biodiesel di Indonesia. Pasalnya, kebutuhan negara ini terhadap biodiesel dapat melonjak sampai 9 juta ton dari permintaan saat ini yang masih di bawah 1 juta ton.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini, sehingga dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



Indonesia Perjuangkan Fatty Alcohols di WTO

JAKARTA, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri tengah memperjuangkan keputusan panel *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO di tahapan lebih tinggi, yaitu forum *Appellate Body* (AB) WTO, untuk sengketa *certain fatty alcohols* asal Indonesia di Jenewa, Swiss.



Sebelumnya, Indonesia keberatan terhadap putusan panel DSB yang memenangkan UE atas penerapan Article 2.3 & 2.4; serta Article 3.1 & 3.5 *Anti-Dumping Agreement* (ADA) dan Indonesia hanya memenangkan klaim terkait article 6.7 ADA mengenai *transparency of investigation report*. Putusan panel tersebut menghasilkan posisi 2:1 untuk UE yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. *"Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi produsen/eksportir yang memiliki afiliasi di luar negeri,"* jelas Dirjen Daglu Oke Nurwan dalam siaran persnya.

Secara terminologi, SEE menerangkan jika perusahaan induk dan anak perusahaan dikontrol oleh perusahaan induk, maka kondisi ini dikatakan sebagai satu kesatuan unit ekonomi (SEE).

Produktivitas Sawit PTPN III Holding Ditargetkan Naik 12%

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara III (Holding Perkebunan Nusantara Persero) mematok target kenaikan produktivitas tandan buah segar (TBS) tahun ini menjadi 18,61 ton per hektare atau tumbuh 12,11% dari tahun sebelumnya yang hanya 16,60 ton per ha. Kenaikan produktivitas itu diharapkan mampu mendorong produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) perusahaan menjadi 2,02 juta ton pada 2017.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dasuki Amsir mengatakan, hingga 51% dari total bisnis perseroan saat ini ditopang oleh kelapa sawit. Kinerja produksi sawit selama empat bulan pertama 2017 merupakan yang terbaik sejak 2014. Produksi CPO pada April 2017 melonjak 32% menjadi 145.090 ton dibandingkan April 2016 yang 110.110 tcm.

Dasuki mengatakan, peningkatan produksi perusahaan ditopang oleh lonjakan produktivitas tanaman kelapa sawit, selain bertambahnya tanaman menghasilkan (TM) meski tidak signifikan. Saat ini, perseroan memiliki 460.585 ha TM dan 55 ribu ha tanaman belum menghasilkan (TBM). (Sumber: *Investor Daily*)

GAPKI Batalkan Judicial Review 4 Pasal UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan



JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akhirnya secara resmi mencabut permohonan gugatan peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Penasehat Hukum GAPKI Refly Harun, mengatakan pencabutan permohonan JR ini karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada dalam pasal-pasal yang diajukan dalam JR tersebut. Yaitu pasal 69, 88, 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

Refly mengatakan selaku kuasa hukum pemohon, telah berdiskusi panjang hingga akhirnya kami mencabut gugatan JR ke MK tersebut. Namun kami juga berpendapat bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam Uji Materi itu perlu diharmonisasikan karena sangat luas penafsirannya," kata Refly.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, GAPKI sebagai asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, berkomitmen untuk selalu melakukan tata kelola perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

(sumber: *sawitindonesia.com*)

Pengusaha Usul Pembangunan Pelabuhan Khusus di Rusia



JAKARTA, Pelaku usaha mengusulkan agar BUMN membuka pelabuhan khusus dan mendirikan tangki Minyak Sawit Mentah (CPO) dan turunannya di Pakistan dan Rusia agar Indonesia tak bergantung lagi pada pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan langkah itu untuk mensiasati hambatan perdagangan ke sejumlah pasar tradisional CPO dan turunannya, seperti Eropa dan AS yang se lama ini meniupkan kampanye hitam maupun mengenakan hambatan tarif.

Adapun, upaya menggarap pasar nontradisional yang daya belinya tidak cukup tinggi dapat dilakukan dengan melayani pembelian secara ritel. Langkah itu dapat ditempuh dengan membuka pelabuhan dan mendirikan tangki di negara tujuan. (sumber: *bisnis.com*)



CILIANDRA PERKASA DUKUNG **PROGRAM ENERGI TERBARUKAN**

Jauh sebelum pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemanfaatan bahan bakar nabati, PT Ciliandra Perkasa telah mempunyai visi pengembangan sektor energi terbarukan melalui produk turunan kelapa sawit yang lebih luas, yaitu biodiesel.

Visi tersebut diaktualisasikan pada 2008 melalui pembangunan pabrik biodiesel di Pelintung, kawasan industri Dumai, Riau, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang bahan bakar nabati.

"Jadi kami, sebagai salah satu pelaku usaha di sektor kelapa sawit, selalu mendukung kebijakan pemerintah tentang biodiesel", ungkap Sikin Hutomo, Head of Business Development First Resources Group.

Bagi Ciliandra Perkasa, pengembangan biodiesel sangat penting mengingat persediaan

bahan bakar minyak fosil yang terus menurun dan menyusut setiap tahunnya. Sehingga, perlu mencari substitusinya dengan memaksimalkan potensi energi terbarukan.

Dan sebagai antisipasi apabila laju produksi energi fosil tak mampu lagi menyamai laju konsumsi masyarakat akan bahan bakar minyak fosil, maka pengembangan energi terbarukan tidak bisa ditunda lagi dan sangat mendesak.

Indonesia, sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, sangat layak mengembangkan energi terbarukan biodiesel yang berbasis dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Biodiesel,

yang dibuat dari bahan baku minyak sawit, bisa menjadi alternatif yang paling tepat kita kembangkan dan wujudkan saat ini. Karena bahan bakunya yang telah tersedia.

Terlebih pada 2015 saat dunia mengalami krisis ekonomi, dimana harga minyak dunia turun signifikan dan ikut menekan angka ekspor minyak kelapa sawit (CPO), perlu dicari cara agar industri sawit dalam negeri tidak ikut terpuruk.

Sebagai upaya menjalankan program di industri sawit antara lain biodiesel, peremajaan tanaman, riset dan promosi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun

2015, Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri ESDM sebagai regulasi mandatori biodiesel sebesar 20 persen (B20) yang disepakati pembiayaan dengan skema dari industri untuk industri tapi pengelolaannya dibawah kendali pemerintah.

Bahan baku biodiesel Ciliandra Perkasa bersumber dari industri hulu sawit yang dikelola perusahaan. Dengan begitu dapat menjamin kesinambungan kapasitas produksi pabriknya sebesar 250.000 MT/tahun atau 287.356 KL/tahun.

"Kami menganut prinsip tepat mutu, tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan prinsip ini, merupakan komitmen kami mendukung proses penyaluran B-20 agar bisa dijalankan sepenuhnya tanpa terputus dan berkesinambungan. Dan telah terbukti selama tiga periode pengiriman untuk program mandatori, kami bisa memenuhi secara baik dan konsisten", tambah Sikin.

Dukungan Ciliandra Perkasa bersama dengan pelaku usaha di sektor kelapa sawit lainnya terhadap mandatori B-20, diharapkan membantu pemerintah dalam penghematan devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak fosil. Selain itu juga, diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri hilir kelapa sawit, dimana CPO

menjadi biodiesel, yang juga memicu peningkatan PDB Indonesia dari kenaikan harga CPO.

Hal ini secara tidak langsung, tentunya dapat meningkatkan penerimaan dan pajak negara, serta berdampak pada maksimalisasi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Dan pada akhirnya akan tercapailah ketahanan energi nasional serta ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Proses Ciliandra Perkasa terlibat dalam program mandatori B-20 tidak selalu berjalan lancar. Sejumlah kendala harus dilalui, salah satunya proses distribusi biodiesel melalui jalur darat ke depo Pertamina.

"Kendala kami di awal-awal adalah saat proses distribusi ke Pertamina melalui jalur darat. Namun seiring dengan waktu, ditunjang juga dengan upaya Pertamina melakukan konversi, semua kendala proses distribusi kini sudah berjalan dengan lancar", kata Sikin.

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, Ciliandra Perkasa memasok produk biodiesel melalui sistem PSO yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Saat ini, untuk mengangkut biodiesel, Ciliandra Perkasa menggunakan jasa sub kontraktor dari pihak ketiga.

"Hal ini semata-mata karena

pertimbangan efisiensi saja, dengan pasar biodiesel saat ini dan produksi biodiesel kami, jadi sekarang untuk angkut biodiesel kami pakai jasa pihak ketiga", ungkap Sikin.

Untuk sementara waktu, Ciliandra Perkasa hanya akan memenuhi permintaan biodiesel yang dibutuhkan Pertamina dan belum ada rencana menambah kapasitas produksi biodieselnnya dalam waktu dekat.

"Kami masih melihat potensi biodiesel di pasar global, apakah permintaan akan biodiesel memiliki peluang positif di tahun-tahun mendatang. Tapi untuk saat ini, kami hanya memproduksi permintaan dalam negeri, sambil menunggu peluang untuk ekspor. Ya, kita lihat perkembangan pasar biodiesel nantinya", kata Sikin.

Sikin menambahkan perusahaan berharap, pemerintah segera membuat suatu kebijakan untuk mempercepat penyerapan volume biodiesel non PSO. Apalagi rencananya B-20 akan ditingkatkan menjadi B-30. Biodiesel bukan sekedar alternatif bahan bakar, tapi juga merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan.

"Jadi, pemerintah perlu sosialisasi tidak hanya kepada pelaku industri biodiesel semata, tapi juga kepada masyarakat luas akan manfaat positif dari biodiesel ini", tambah Sikin. (*)



PT Batara Elok Semesta Terpadu



MENJAGA KUALITAS BIODIESEL SEBAGAI DUKUNGAN MANDATORI B20

PT Batara Elok Semesta Terpadu mendukung pelaksanaan program mandatori B20 yang telah berjalan semenjak dua tahun terakhir. Pabrik biodiesel yang dikelola perusahaan punya kapasitas terpasang sebanyak 250 ribu ton per tahun.

"Perusahaan mendukung sepenuhnya program mandatori B20. Bagi kami ini adalah program nasionalis karena berupaya mengurangi jumlah impor solar sekaligus berusaha memberdayakan produksi dalam negeri," ujar Jacob Tirtawidjaja, Direktur PT Batara Elok Semesta Terpadu.

Perusahaan mulai memproduksi biodiesel semenjak tahun 2016. Fasilitas Produksi biodiesel perusahaan berada di Kawasan Industri Maspion, Gresik Jawa Timur. Jumlah kapasitas

produksi biodiesel mencapai 250 ribu metrik ton per tahun.

Jacob Tirtawidjaja menuturkan kendala utama saat ini belum optimalnya utilisasi kapasitas produksi. Pasalnya, kuota yang dapat diberikan Pertamina baru sekitar 30% dari kapasitas terpasang pabrik. Itu sebabnya, perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas produknya. Dengan tujuan dapat menambah kepercayaan Pertamina terhadap produk biodiesel yang dihasilkan perusahaan sebagai produsen baru.

Kegiatan penyaluran biodiesel ke



Pertamina telah didukung sejumlah fasilitas memadai. Pengiriman bahan baku ke pabrik biodiesel mendapatkan dukungan beberapa kapal tongkang

untuk membawa bahan baku dari area perkebunan PT Best di Kalimantan Tengah dan Kalimantan barat ke lokasi pabrik. Jacob menyebutkan perusahaan juga memiliki fasilitas jetty pribadi baik di kawasan pabrik maupun di Kalimantan.

Menurut Jacob, pihaknya menggandeng perusahaan jasa transportasi untuk mendistribusikan produk biodiesel dari lokasi pabrik ke depo Pertamina sesuai Keputusan Menteri ESDM. "Pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa transportasi y selama ini sangat berpengalaman dan sangat baik reputasinya dalam hal penyaluran biodiesel ke depo Pertamina yang sudah ditunjuk," ujarnya.

PT Batara Elok Semesta Terpadu mulai terlibat dalam pengadaan biodiesel bersubsidi pada periode November 2016-April 2017 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 222/K/12/DJE/2017 tentang Penetapan BU BBN dan Alokasi Besaran Volume untuk Pengadaan BBN Jenis Biodiesel periode November 2016-April 2017. Mereka menerima alokasi sebesar 31.774 KI untuk wilayah pengiriman Rewulu, Cepu, dan Bojonegoro.

Selanjutnya jumlah alokasi untuk PT Batara Elok Semesta Terpadu meningkat menjadi 38.360 KI untuk pengadaan Mei-November 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 254 K/10/DJE/2017 tentang Penetapan BU BBN Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volumennya untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Bioediesel pada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk Periode Mei 2017 - Oktober 2017.

Penjualan biodiesel perusahaan, menurut Jacob, difokuskan untuk memenuhi suplai biodiesel ke Pertamina. "Selain itu, kami melakukan penajakan untuk memasarkan di luar Pertamina yang menjadi bagian rencana jangka panjang," kata Jacob.

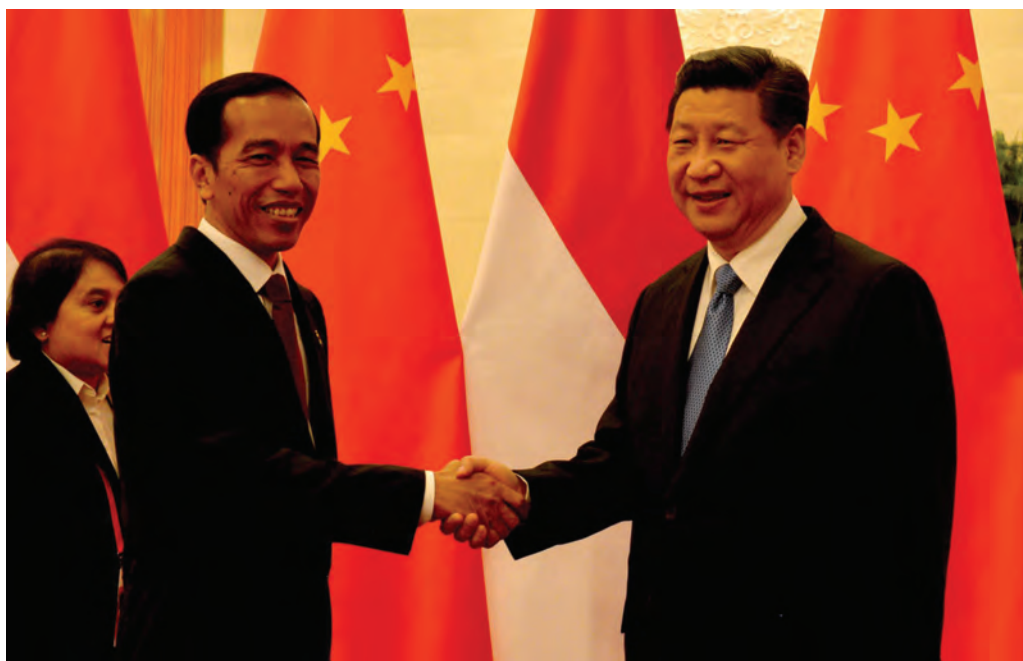
Jacob menjelaskan pihaknya terus melakukan pendekatan dan marketing untuk retail di luar Pertamina terutama para importir yang menjual produk solarnya. Tak hanya itu, perusahaan juga memanfaatkan penggunaan biodiesel di internal grup baik di kebun, armada pengiriman dan refinari.

Dalam dua sampai tiga tahun mendatang, perusahaan akan fokus menjalankan kegiatan riset dan pengembangan supaya mencapai kualitas biodiesel di atas rata-rata produksi kompetitor. Tujuannya, kata Jacob, dapat membantu meningkatkan kualitas bahan bakar biodiesel Pertamina di dalam negeri. Langkah ini pun sebagai upaya membuktikan kualitas biodiesel produksi perusahaan terhadap konsumen di luar Pertamina. (*)



MENYOKONG PROGRAM BIODIESEL TIONGKOK

Indonesia mendukung program B-5 Tiongkok untuk mengurangi pengeluaran emisi karbon. Presiden RI, Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku CPO sebagai bahan baku utama biodiesel.



Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar kepada industri kelapa sawit di Indonesia. Perhatian ini dibuktikan dalam kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo menawarkan dukungan kepada program B-5 Tiongkok.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan Tiongkok. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun. "Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak," kata Jokowi.

Program B-5 mulai berjalan di Tiongkok semenjak Januari 2017. Program biodiesel merupakan bagian dari kebijakan Biofuel Negara Tirai Bambu yang ditujukan melindungi lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mencegah berkurangnya energi.

Pada penghujung 2014, Pemerintah

Tiongkok menetapkan Rencana Perubahan Iklim Nasional berkaitan pengurangan emisi karbon dan target energi bersih sampai tahun 2020. Dalam Rencana Perubahan Iklim ini disebutkan target konsumsi biofuel sebesar 130 miliar meter kubik pada 2020.

Ada dua jenis biofuel menjadi fokus pengembangan: biodiesel dan etanol.

Tahun lalu, pemerintah Tiongkok mengumumkan target ambisius untuk meningkatkan pasokan etanol sebesar 5 juta ton dan 2 juta ton biodiesel sampai 2020. Target ini dibuat untuk melipatgandakan produksi etanol dan meningkatkan produksi biodiesel empat kali lipat dari jumlah sekarang ini.

Industri biodiesel Tiongkok masih dalam tahap awal pengembangan. Tahun 2017, kapasitas produksi biodiesel di negara ini sekitar 500 juta liter atau sekitar 500 ribu ton, jumlah ini sama dengan tahun 2016. FAS USDA memproyeksikan permintaan biodiesel melamban di kisaran 521 juta liter pada pelambatan akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya jumlah kendaraan.

Laporan Chinese Academy of

Sciences menunjukkan kapasitas terpasang produksi biodiesel di Tiongkok antara 3 juta sampai 3,5 juta ton. Pada tahun ini, hanya 26 pabrik yang masih beroperasi lebih rendah dari tahun 2008 berjumlah 84 pabrik ketika industri biodiesel masih berjaya.

Pelaku industri Tiongkok mengandalkan minyak goreng bekas sebagai sumber bahan baku biodiesel. Peneliti di Universitas Tsinghua memperkirakan bahwa China adalah penghasil minyak goreng bekas terbesar di dunia mencapai 13,74 juta ton limbah pada 2010. Tetapi, kualitas minyak goreng bekas dipertanyakan untuk memenuhi standar biodiesel nasional di Tiongkok.

Pengguna biodiesel di Tiongkok adalah sektor industri menyumbang 54 persen. Berikutnya sektor transportasi kendaraan sebesar 28 persen dan menyusul Mesin pertanian dan kapal penangkap ikan berkontribusi 18 persen.

Antara tahun 2012 dan 2014, Tiongkok mengimpor biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO) terutama dari Indonesia dan Malaysia. Namun setelah kejatuhan harga

minyak mentah internasional di bulan Juni 2014, impor biodiesel berbasis CPO ikut merosot.

Memperkuat pasar Tiongkok

Produsen biodiesel mengapresiasi kebijakan pemerintah Tiongkok yang akan memberlakukan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5. Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

"Pemakaian B5 di Tiongkok akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau Tiongkok sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat," kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dalam silaturahmi bersama media di Jakarta pada awal Juni 2017.

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar Tiongkok sebesar 180 juta Kl. Apabila dikalikan 5% sama dengan 9 juta Kl atau setara

9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,8 juta ton.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke Tiongkok sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. "Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan," ujarnya.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari Tiongkok dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sahat Sinaga menjelaskan bahwa semenjak tahun 2017 biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif, akibat harga pasar yang kurang bersahabat dengan biodiesel Indonesia. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

"Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya

sama-sama ada bea masuk tambahan," ujar Sahat.

Fakto lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. MP Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke Amerika Serikat terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

"Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi," jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di Tiongkok. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha Tiongkok mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. "Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya," pungkas Sahat. (*)

PROFIL INDUSTRI BIODIESEL TIONGKOK 2008-2017 (JUTA LITER)

Uraian	Tahun									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2016	2017
Produksi	534	591	568	738	909	1,079	1,133	545	500	500
Impor	0	0	0	0	49	895	1028	34	8	8
Ekspor	0	0	0	0	0	0	29	21	20	20
Konsumsi	534	591	568	738	958	1974	2132	558	488	488
Stok Akhir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapasitas Produksi										
Jumlah refinari	84	62	45	49	52	53	53	31	30	28
Kapasitas terpasang	3,351	2,670	2,556	3,400	3,600	4,000	4,000	2,431	2,372	2,680
Utilisasi	15.9	22.1	22.2%	21.7%	25.3%	27.0%	28.3%	22.4%	21.1%	18.7%

Sumber: China General Administration of Customs

IMPOR B-100 TIONGKOK BERDASARKAN NEGARA TUJUAN (JUTA LITER)

Negara	2013	2014	2015	2016
Indonesia	588.418	1.038.086	12.688	-
Malaysia	1.574.917	197.958	4.894	5.658
Singapura	262.197	13.050	0	-
Thailand	955,952	2	-	-

Sumber: China General Administration of Customs

PENGADAAN BIODIESEL BERSUBSIDI **TURUN** MENJADI 1,37 JUTA KL

Pemerintah menurunkan pengadaan biodiesel bersubsidi menjadi 1,37 juta KL untuk periode Mei-Oktober 2017. Keputusan ini telah ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen) No 234K/10/DJE/2017.

Pada periode Mei-Oktober 2017, pengadaan biodiesel bersubsidi sebanyak 1,37 juta KL. Jumlah ini lebih rendah dari periode sebelumnya November 2016-April 2017 sebesar 1,530 juta KL.

Dadan Kusdiana, Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, menjelaskan turunnya kuota biodiesel bersubsidi disebabkan beberapa faktor antara lain beberapa depo Pertamina masih menghadapi kendala dalam penyaluran. Selain itu, pemanfaatan BBM di sektor pembangkit listrik mengalami penurunan ini berakibat kepada berkurangnya penggunaan biodiesel.

Dalam Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor 234/2017 disebutkan bahwa alokasi biodiesel sebesar 1,37 juta KL ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo. Pasokan biodiesel bersumber dari 19 perusahaan nasional.

Komposisinya adalah pengadaan biodiesel bersubsidi kepada Pertamina sebesar 1.349.748 KL. Mereka adalah PT Musim Mas memasok 176.859 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 175.262 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 172.553 KL, PT Bayas Biofuels 115.080 KL, PT Cemerlang Energi Perkasa 92.064



KL, PT LDC Indonesia 63.605 KL, PT Intibenua Perkasatama 59.074 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 55.699 KL, dan PT SMART Tbk 53.106 KL.

Selanjutnya adalah PT Tunas Baru Lampung 52.864 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 52.369 KL, PT Sinarmas Bio Energy 42.130 KL, PT Kutai Refinery 39.254 KL, PT Dabi Biofuels 38.717 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 38.360 KL, PT Darmex Biofuels 38.360 KL, PT Ciliandra Perkasa 38.360 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 30.688 KL, dan PT Energi Baharu Lestari.

Sedangkan pasokan biodiesel kepada AKR Corporindo sebesar 24 ribu KL yang dipasok oleh 7 perusahaan. Antara lain PT Wilmar Nabati Indonesia memasok 10.740 KL, PT SMART Tbk 5.700 KL, PT Musim Mas 4.200 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 1.200 KL, PT Tunas Baru Lampung 840 KL, PT LDC Indonesia 840 KL, dan PT Sinarmas Bio Energy 480 KL.

Turunnya pasokan biodiesel

bersubsidi ditengarai sebagai dampak pemangkasan anggaran BPDP-KS untuk program biodiesel pada tahun ini. Sebagai informasi, dana biodiesel pada tahun ini diproyeksikan Rp9,6 triliun lebih rendah daripada tahun 2016 sebesar Rp10,7 triliun. Dengan rerata harga minyak mentah sepanjang 2017 berada di kisaran US\$50—US\$60 per barel.

Kendati demikian, Dadan menepis anggapan tersebut. "Dana masih cukup," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), mengharapkan program B20 tetap menjadi komitmen untuk terus dijalankan pemerintah. Pasalnya, biodiesel sangat besar kontribusinya untuk menghemat pengeluaran emisi GRK. Dari sektor energi dan transportasi, program mandatori B-20 mampu menghemat emisi karbon sampai 18,2 juta ton CO₂ (*)



MENKO LUHUT PANJAITAN BICARAKAN KELANJUTAN INVESTASI DENGAN TIONGKOK

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bertolak ke ke Beijing, Tiongkok, untuk melanjutkan pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Luhut akan ada di Beijing hingga 17 Juni 2017.

"Pertemuan bilateral Jokowi dan Jinping sudah berlangsung satu bulan lalu," kata Luhut seperti dirilis Kantor Berita Antara di Beijing, Kamis 15 Juni 2017.

Ditambahkan Luhut, Presiden Jokowi telah menawarkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan di Bitung, Sulawesi Utara; Kuala Tanjung, Sumatera Utara; Kalimantan Utara; dan Bali. Indonesia juga menawarkan proyek teknologi canggih dan kelapa sawit serta biodiesel.

"Saya lihat Presiden Jinping sudah menyampaikan pernyataan resmi untuk (meningkatkan) kerja sama

dengan Indonesia," imbuhnya.

Indonesia tergolong terlambat merespons keinginan Tiongkok yang menawarkan berbagai proyek infrastruktur di berbagai negara. Khususnya di kawasan "One Belt, One Road" yang membentang dari Eropa, Afrika, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

"Kemarin Malaysia sudah ground breaking (melakukan peletakan batu pertama) (proyek senilai) 16 miliar dolar AS untuk transportasi kereta cepat dari Singapura ke Kuala Lumpur," kata Luhut.

Ia menilai keterlambatan tersebut, karena situasi sosial dan politik di Indonesia yang masih gaduh sampai saat ini. Luhut berharap proyek kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung segera rampung, sehingga dapat mengatasi kepadatan arus lalu lintas di jalur tersebut.

Sebelumnya China yang berinvestasi di kereta api cepat

Jakarta-Bandung tersebut mengklaim, proyeknya itu merupakan yang pertama kalinya di kawasan Asia Tenggara.

Selama di Beijing, Luhut akan menemui beberapa pejabat setingkat menteri pemerintah China dan menggelar pertemuan bisnis dengan para pengusaha setempat. Dalam kunjungannya ke Ibu Kota China itu, dia didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta sejumlah pengusaha dari Indonesia, termasuk beberapa direktur BUMN.

Duta Besar RI untuk China Soegeng Rahardjo yang turut mendampingi para menteri menyebutkan bahwa mereka juga dijadwalkan bertemu dengan Bank Pembangunan China (CBD) dan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi.

GEBRAKAN MENTERI JONAN PANGKAS PERIJINAN



Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan memangkaskan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Pemangkasan perijinan tersebut mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia agar dapat meningkatkan iklim investasi di sektor ESDM.

Dari empat subsektor ESDM, subsektor minyak dan gas bumi mengalami pemangkasan yang paling besar. "Di subsektor migas melalui Permen ESDM Nomor 29/2017, memang nambah satu peraturan yakni Peraturan Menteri, tapi ini peraturan yang menyederhanakan perijinan dari 104 perizinan di sektor migas menjadi hanya 6 perizinan," ujar Jonan dalam

jumpa pers pada 14 Juni 2017, di Kantor Kementerian ESDM.

"Penyederhanaan perizinan merupakan satu dari banyak upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Realisasi investasi sektor ESDM tahun 2016 mencapai sekitar US\$ 27 miliar, terdiri dari Migas US\$ 9,8 miliar, Ketenagalistrikan US\$ 8,1 miliar, Minerba US\$ 7,2 miliar, dan EBTKE US\$ 1,6 miliar," ujar Jonan.

Menteri Jonan menyebutkan pada tahun 2017 ini setidaknya telah diterbitkan 3 peraturan penyederhanaan perizinan, yaitu Permen ESDM Nomor 13/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor ESDM, Permen ESDM Nomor

29/2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan Permen ESDM Nomor 34/2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada subsektor migas, lanjut Menteri Jonan, berdasar Permen ESDM Nomor 29/2017, perizinan disederhanakan dari sebelumnya 104 perizinan menjadi 6 perizinan. "Enam perizinan tersebut yaitu 2 izin terkait hulu migas (izin survei umum dan pemanfaatan data migas), dan 4 terkait hilir migas (izin pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga)," jelas Menteri Jonan.

Sementara itu di subsektor minerba, melalui Permen ESDM Nomor 34/2017, sebanyak 24 persetujuan dihapus, 38 rekomendasi dan perizinan diintegrasikan menjadi persetujuan RKAB. Sedangkan perizinan yang semula sebanyak 117 izin diringkaskan menjadi 6 perizinan. "Dari 6 perizinan tersebut hanya 2 yang ditangani oleh Kementerian ESDM, 4 perizinan lainnya telah dilimpahkan ke BKPM. Izin minerba yang masih ditangani KESDM yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi," papar Menteri ESDM.

Sebelumnya di subsektor ketenagalistrikan, sebanyak 10 perizinan telah dilimpahkan ke BKPM melalui Permen ESDM Nomor 35/2014. Sebagian dari izin di BKPM tersebut, untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) sementara, dapat dikeluarkan dalam 3 jam. Hingga kini ada 6 pembangkit listrik yang mendapatkan IUPTL sementara dalam waktu 3 jam. Sementara perizinan ketenagalistrikan yang ditangani oleh KESDM hanya 3 sertifikasi dan 2 rekomendasi, yaitu Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, serta Rekomendasi Rencana Impor Barang (RIB), dan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Ke-5 perizinan tersebut pun telah dapat dilakukan secara online.

Di subsektor energi baru terbarukan (EBT), sebanyak 31 perizinan dan nonperizinan telah disederhanakan menjadi 14 perizinan dan nonperizinan, dimana 4 diantaranya sudah dilimpahkan ke PTSP-BKPM. 10 perizinan dan non perizinan yang masih ditangani Ditjen EBTKE meliputi

Perizinan:

1. Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara (AC)
2. Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swaballast
3. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Non Perizinan:

1. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan panas bumi
2. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi panas bumi
3. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing
4. Rekomendasi izin menggunakan tenaga kerja asing
5. Rekomendasi rencana impor barang panas bumi
6. SKT Jasa penunjang konservasi energi (ESCO)
7. Rekomendasi ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (BBN)

Dalam penutupan penjelasannya, Menteri Jonan menekankan mengenai kecepatan proses pelayanan dalam menangani perizinan. "Satu yang bisa kita lakukan sekarang adalah pengurangan jumlah perizinan dan rekomendasi. Langkah selanjutnya adalah kecepatan dalam proses. Dunia usaha ini yang penting adalah cepatnya," tegas Jonan.

MEMBANGUN INDUSTRI BIODIESEL BERSAMA MEDIA

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Produsen Oleochemicals Indonesia (Apolin) mengadakan buka puasa bersama media pada 8 Juni 2017 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri MP Tumanggor (Ketua Umum APROBI), Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI), dan Stanley (Sekjen APROBI).



Dalam acara yang berlangsung santai ini, 25 jurnalis dari media dalam dan luar negeri hadir dalam kegiatan ini. MP Tumanggor mengapresiasi peranan media dalam menginformasikan perkembangan terkini industri biodiesel Indonesia. sebab, media punya peranan penting membawa informasi positif kepada publik.

Dalam acara ini, Tumanggor menerangkan kapasitas produksi biodiesel Indonesia mencapai 11 juta ton per tahun. Dari jumlah ini konsumsi dalam negeri sebanyak 4 juta ton. Apabila, program B-5 Tiongkok dapat terealisasi maka produksi dapat tersalurkan penuh.

Senada dengan Tumanggor, Sahat Sinaga juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media kepada industri kelapa sawit baik hulu maupun hilir. Di kalangan jurnalis sawit, Sahat Sinaga termasuk narasumber handal untuk mendapatkan up date data dan informasi terkait industri sawit.

Dalam kegiatan ini, Sahat Sinaga mengusulkan pembangunan pelabuhan khusus sawit untuk membantu kegiatan ekspor ke Rusia dan Pakistan. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi bergantung kepada pasar Eropa. Harus diakui, baik Pakistan dan Rusia punya potensi besar bagi Indonesia terutama apabila Jalur Sutra dari Tiongkok ke Eropa terealisasi.

Dia mengusulkan supaya pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun tangki sawit di kedua negara. Dengan begitu, ekspor CPO dan turunannya ke Rusia dan Pakistan bisa bertambah dua kali lipat dari saat ini yang masing-masing sebesar 350 ribu ton dan 1,2 juta ton.

"Jika ada jalur tadi lalu dibangun tanki disitu. Ekspor ke Pakistan dan Rusia berpotensi bertambah jadi dua kali lipat. Apalagi kalau Tiongkok jadi B5, selesai sudah. Kita bisa bilang ke Eropa, maaf ga ada stok," tegas Sahat.

Subagyo, Jurnalis LKBN Antara, mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama yang rutin diselenggarakan asosiasi industri hilir sawit ini. Pasalnya, kegiatan ini bermanfaat untuk mendapatkan perkembangan terkini kelapa sawit dari isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. "Sekalian bisa menambah narasumber sawit yang selama ini diwawancarai," ucap Subagyo yang juga Ketua Forum Wartawan Pertanian ini.

Hal sama dikatakan Aditya Nugoro, jurnalis dari Forum Wartawan Perindustrian, yang menyambut baik kegiatan buka puasa APROBI dan asosiasi hilir sawit. Apalagi kelapa sawit termasuk sektor strategis bagi perekonomian nasional. Dalam hal ini, media bisa berperan untuk menjaga komoditas ini dari isu negatif. (*)

PERLUKAH DIBUAT RUU ENERGI BARU TERBARUKAN?

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membuat inisiatif usulan RUU mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bertujuan mendorong pengembangan energi hijau. Penerbitan RUU ini dipandang penting di saat cadangan energi fosil mengalami penurunan.

Ketua Komite II DPD Parliindungan Purba mengatakan, saat ini cadangan energi fosil tidak mampu mencukupi peningkatan kebutuhan energi dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan EBT, sehingga terdapat payung hukum dalam pengembangan EBT oleh semua pihak.

Senator dari Sumatera Utara ini juga menilai, saat ini pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengembangkan EBT, padahal potensi sumber daya EBT tersebar di berbagai daerah.

"Pengembangan bauran EBT meningkat 0,3 persen per tahun. Daerah punya potensi tinggi tapi potensi yang besar itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Subsidi untuk pengembangan EBT masih terlalu kecil dibandingkan subsidi untuk energi fosil," kata Parliindungan Purba dalam keterangan tertulis.

Mengingat potensi EBT tersebar di berbagai daerah, DPD RI mendorong agar Kementerian ESDM untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Energi Terbarukan Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan, kehadiran RUU Energi Terbarukan sangat penting untuk pengembangan energi di Indonesia. Sebab, Indonesia

masih bergantung terhadap sumber energi dari fosil yang jumlahnya kian menipis. Sedangkan kebutuhan energi dari masyarakat meningkat di berbagai daerah.

Terkait hal itu, Timja mengadakan rapat membahas konsepsi naskah akademik RUU Energi Terbarukan untuk menyusun naskah akademik RUU Energi Terbarukan sebagai RUU inisiatif DPD RI.

"Keberadaan RUU ini diharapkan dapat mengatur pengembangan energi terbarukan sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada energi fosil. Pemerintah harus serius melakukan pengembangan energi terbarukan di Indonesia mengingat banyaknya daerah yang belum mendapatkan listrik. Padahal daerah tersebut memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik," ujar Wa Ode.

Wa Ode menambahkan, keberadaan RUU tentang energi terbarukan akan mengatur soal energi terbarukan yang belum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007. Sehingga dapat memberikan solusi permasalahan energi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II Aji Mirza mempertanyakan kesiapan dari pemerintah terkait pengembangan EBT. Aji menganggap pengembangan EBT membutuhkan teknologi yang

baru dengan biaya yang tinggi. Dia juga menjelaskan bahwa RUU tentang Energi Terbarukan mampu menjadi motor pendorong dari pengembangan EBT.

"RUU energi baru terbarukan ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan EBT. Karena selama ini belum ada yang memulai dan dari DPR juga menganggap RUU ini bagus," papar senator asal Kalimantan Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen EBTKE, Rida Mulyana mengakui bahwa saat ini dunia akan memasuki krisis energi. Kebutuhan energi fosil meningkat namun jumlahnya terbatas, dan harus ada diversifikasi berupa energi baru sebagai pengganti energi fosil. Diversifikasi energi juga harus dilakukan untuk kepentingan lingkungan yang bersih.

Target pengembangan EBT yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 23 persen atau setara dengan 45 GW. Penyediaan akses energi modern dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97 persen pada tahun 2019. Indonesia juga berkomitmen 29 persen penurunan gas rumah kaca pada tahun 2030. Sektor energi ditargetkan berkontribusi pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO₂. Meskipun begitu dirinya mengakui bahwa saat ini pengembangan EBT masih jauh dari target yang ditetapkan.

Dari target minimum 23 persen,



sampai saat ini baru tercapai 6,9 persen. Artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Rida menambahkan tantangan dalam pengembangan EBT muncul dari beberapa hal. Tantangan tersebut berupa tantangan teknologi masih tergantung dari luar negeri, potensi sumber energi masih berskala kecil dan tersebar, sistem interkoneksi masih terbatas, masih terdapat resistensi masyarakat terhadap EBT, dan kurangnya kepastian hukum untuk mengembangkan EBT.

Mantan Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Endro Utomo Notodisuryo menjelaskan bahwa sesungguhnya perkembangan energi terbarukan tidak berkaitan penyusunan undang-undang, tetapi pada implementasi dari

undang-undang tersebut. Kendalainya lain kurangnya peranan good governance dalam rumusan UU Energi yang kurang sempurna untuk dapat diimplementasikan. Dirinya meminta agar RUU mengenai energi terbarukan dari DPD RI dapat lebih mengikat dalam pengembangan energi terbarukan dan juga termasuk implementasinya untuk kepentingan daerah.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Iwan Supangkat Santoso menyebutkan Pengembangan EBT perlu dimassifkan karena Indonesia punya potensi besar mulai dari tenaga gelombang, tenaga surya hingga tenaga angin.

“Pengembangan EBT memang

tidak mudah. Hal ini terkait dengan masalah teknologi yang akan digunakan masih relatif mahal sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi harga listrik per kwh yang dihasilkan, dibanding listrik dari sumber energi lain seperti batubara dan gas,” ujarnya sebagaimana dilansir dari harian **Investor Daily**.

“Kalau harga beli tinggi, PLN memang yang akan menanggung kerugiannya. Dengan demikian. Maka perlu dicarikan solusi, apakah dengan menambah subsidi atau kebijakan lain,” paparnya.

Sekretaris Eksekutif MKI Bambang Hermawanto mengatakan sebenarnya peran swasta perlu didorong untuk pengembangan EBT yang ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025. (*)

PASAR BIODIESEL AMERIKA SERIKAT **DALAM TEKANAN**

Keputusan Amerika Serikat mundur dari Kesepakatan Iklim Paris, mencemaskan berbagai negara. Dalam hal ini, ekspor biodiesel ke Negara Paman Sam berpotensi turun. Ini disebabkan mandatori biofuel kemungkinan tidak lagi berlaku.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat membuat keputusan kontroversial di awal Juni 2017. Berpidato di Taman Mawar Gedung Putih, Presiden Trump mengumumkan mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan iklim Paris 2015. Kesepakatan Iklim Paris disinyalir berdampak kepada kepentingan ekonomi Negara Paman Sam.

Kesepakatan Iklim Paris tahun 2015 menetapkan bahwa Amerika Serikat termasuk 187 negara diwajibkan menjaga kenaikan temperatur global 'jauh di bawah' 2°C (3,6°F) dan 'berupaya membatasi' pada 1,5°C.

Trump berpendapat kesepakatan Paris menyebabkan kehilangan Produk Domestik Bruto sebesar US\$3 triliun dan 6,5 juta lapangan kerja, sementara saingan ekonomi seperti Cina dan India mendapat perlakuan yang lebih baik.

"Untuk memenuhi tugas sungguh-sungguh dalam melindungi Amerika dan warganya, Amerika Serikat akan mundur dari kesepakatan iklim Paris. Jadi kami akan ke luar namun akan memulai perundingan dan kita akan lihat apakah kita membuat kesepakatan yang adil," tegas Trump seperti dilansir dari situs *bbc.com*.

Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, menyayangkan langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mundur dari Kesepakatan Paris. Keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen kerjasama internasional.

"Indonesia terus mengikuti dari dekat kebijakan pemerintah AS begitupun isu perubahan iklim. Lalu,



kami pun mendengar AS menarik diri dari Kesepakatan "Paris Climate Forum". Keputusan Amerika itu tidak sejalan dengan komitmen kerja sama internasional," kata Arrmanatha.

Master Parulian Tumanggor Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) mengkhawatirkan penurunan ekspor biodiesel ke Amerika Serikat pasca keputusan Presiden Trump yang mundur dari Kesepakatan Iklim Paris pada 2015. "Mereka akan menggunakan minyak yang dimilikinya tanpa punya kewajiban pencampuran dengan biodiesel untuk penurunan emisi," ujar Tumanggor.

Tumanggor mengakui keputusan Amerika Serikat ini menjadi pukulan bertubi-tubi terhadap ekspor biodiesel Indonesia. Penyebabnya penjualan biodiesel Indonesia ke AS mengalami hambatan dengan adanya tuduhan dumping. Kebijakan mempersulit ekspor biodiesel Indonesia ke AS dinilai sebagai strategi perang dagang.

Dalam dua tahun terakhir, penjualan biodiesel Indonesia ke Amerika naik signifikan dan menguasai sekitar 5,1% pangsa pasar biodiesel AS. Kondisi ini makin mengkhawatirkan para produsen minyak nabati lainnya di AS karena kalah bersaing dengan biodiesel asal Indonesia yang harganya lebih murah.

Pada awal Maret 2017, National Biodiesel Board Fair Trade Coalition **mengajukan** petisi antidumping dan antisubsidi biodiesel. Petisi ini ditujukan kepada Kementerian Perdagangan Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat. Tujuan akhir petisi ini mengusulkan bea masuk tinggi kepada produk biodiesel Indonesia dan Argentina.

Dadan KUSDiana, Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, menyatakan penjualan biodiesel Indonesia tidak akan terkena dampak keluarnya Amerika dari Kesepakatan Iklim Paris. Faktor utama yang memengaruhi ekspor biodiesel ke Amerika adalah kebijakan perdagangan mereka seperti tuduhan anti dumping dan isu keberlanjutan sawit.

"Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak akan berdampak besar. Penggunaan biodiesel di Amerika sepertinya akan terus berjalan, tidak ada perubahan," ujar Dadan.

Senada dengan Dadan KUSDiana, MP Tumanggor tetap yakin kebijakan Trump ini belum tentu dilaksanakan negara-negara bagian di AS. Jika 50 negara bagian di AS tidak menerapkan kebijakan Trump, maka ekspor biodiesel punya peluang besar untuk mengisi kebutuhan bahan energi terbarukan di negara tersebut. (*)